



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2018**



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI

Jl. Sudirman Nomor 27-29 Bukittinggi Telp/Fax. 0752 23976

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD	3
B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD	17
BAB III PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	18
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA	18
B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN	18
BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	19
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH	19
B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA	19
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL	19
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH	20
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	20
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS.....	20
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN	
III.1 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017	
III.2.DAFTAR NOMINATIF/ BEZZETING PNS PER DESEMBER 2017	
III.3 KARTU INVENTARIS BARANG DESEMBER 2017	
III.4 ANGGARAN DAN REALISASI BIAYA 2017	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu bentuk laporan tersebut adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD. LKPJ yang disampaikan kepada DPRD ini merupakan bentuk hubungan kesetaraan dan kemitraan Kepala Daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif, dimana kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan checks and balances yang seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, maka Walikota Bukittinggi berkewajiban menyampaikan LKPJ penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2018. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam rangka mendukung penyusunan LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, dibutuhkan bahan dan dokumen pendukung dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pelaksana program dan kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi juga melaksanakan penyusunan LKPJ berbasis Program dan Kegiatan SKPD.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pemberian dukungan atas Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Pemberian dukungan atas Kewaspadaan Dini;
- d. Peningkatan Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Bukittinggi diarahkan guna mewujudkan suasana kota yang kondusif dan stabil serta kehidupan masyarakat yang demokratis. Dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi melaksanakan 9 (Sembilan) program dengan 34 (tiga puluh empat) kegiatan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program dan kegiatan tersebut sebesar Rp.4.074.495.895,- dan dapat teraealisasi sebesar Rp. 3.694.156.980,- (90.67%) dengan rician sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Tujuan : Meningkatnya sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat
- Sasaran : Meningkatnya sistem administrasi perkantoran tertib dan lancar

Program pelayanan administrasi perkantoran yang merupakan program rutin dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Tujuan : Tersedianya jasa surat menyurat dalam rangka menyediakan bahan pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.2.099.000,-	Rp.2.099.000,-
Output/ Keluaran	Tersedianya Materai dan Buku Cek	470 lembar materai 2 buku cek	22 lembar materai 2 buku cek
Hasil	Tersedianya Administrasi Surat Menyurat	100%	100%

Permasalahan : -

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Tujuan : Tersedianya Jasa Komunikasi pelayanan administrasi perkantoran yang bertujuan untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi dan Informasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.30.160.000,-	Rp.23.776.934,-
Output/ Keluaran	Tagihan telepon dan speedy	12 bulan	12 bulan
Hasil	Terlaksananya Komunikasi Perkantoran	100%	78.84%

Permasalahan : -

Kurangnya tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena pembayaran tagihan telepon dan internet sesuai dengan tagihan

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tujuan : Tersedianya Jasa pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional yang bertujuan terpeliharanya kendaraan Dinas untuk kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.52.584.000,-	Rp.44.075.350,-
Output/ Keluaran	Kendaraan dinas yang dipelihara	1 unit kendaraan dinas roda 4, 2 unit kendaraan dinas roda 2	1 unit kendaraan dinas roda 4, 2 unit kendaraan dinas roda 2
Hasil	Kendaraan dinas beroperasi dengan baik	100%	83.82%

Permasalahan : Kurangnya tingkat penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena pencairan dana sesuai dengan kebutuhan dan efesiensi.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tujuan : Tersedianya Jasa kebersihan kantor untuk terjaganya kebersihan kantor dan peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 38.700.000,-	Rp.38.686.120,-
Output/ Keluaran	Tersedianya alat kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan

Hasil	Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman	100%	99.96%
-------	--	------	--------

Permasalahan : -

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

Tujuan : Tersedianya Jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 5.000.000,-	Rp. 4.860.000,-
Output/ Keluaran	Komputer/laptop/ printer yang dipelihara	5 unit komputer, 8 unit laptop, 5 unit printer, 2 unit air purevire, 1 unit AC 2 unit TV	5 unit komputer, 8 unit laptop, 5 unit printer, 2 unit air purevire, 1 unit AC 2 unit TV
Hasil	Peralatan kerja berfungsi dengan baik	100%	97.20%

Permasalahan : -

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tujuan : Tersedianya Alat Tulis Kantor bertujuan untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.14.576.700,-	Rp.14.576.700,-
Output/ Keluaran	Alat Tulis Kantor	1 paket	1 paket
Hasil	Terpenuhinya alat tulis kantor	100%	100%

Permasalahan : -

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Tujuan : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan dilaksanakan guna peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 10.010.000,-	Rp. 10.008.500,-
Output/ Keluaran	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	4 macam barang cetak dan 12 bulan penggandaan.	4 macam barang cetak dan 12 bulan penggandaan.
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	99.99%

Permasalahan : -

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tujuan : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dilaksanakan untuk peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.1.405.000,-	Rp.1.405.000,-
Output/ Keluaran	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	8 macam	8 macam
Hasil	Fasilitas penerangan kantor yang memadai	100%	100%

Permasalahan : -

9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

Tujuan : Terfasilitasi Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Dinas dengan baik

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 8.470.000,-	Rp. 7.233.200,-
Output/ Keluaran	Tersedianya makanan dan minuman	130 bungkus makan 40 porsi minum 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang ka.kan	130 bungkus makan 40 porsi minum 90 kotak snack 1 paket makan minum ruang ka.kan
Hasil	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%	85.40%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan efesiensi.

10. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi Dan Perjalanan Dinas Lainnya Ke Luar Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Perjalanan dinas dalam rangka Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi dan Sosialisasi untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 164.500.000,-	Rp. 155.613.100,-
Output/ Keluaran	Terlaksananya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan
Hasil	Tersedianya informasi yang bisa ditindaklanjuti	100%	94.60%

Permasalahan : -

11. Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Tujuan : Terlaksananya Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dilaksanakan guna peningkatan sistem pelayanan administrasi perkantoran

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 7.592.420,-	Rp.7.170.000,-
Output/ Keluaran	Tersedianya Honor bagi PPK, PPBJ dan PPHP	1 paket	1 paket
Hasil	Terpenuhinya honor bagi PPK, PPBJ dan PPHP	100%	94.44%

Permasalahan :

II. Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tujuan : Meningkatnya kenyamanan kerja aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran : Sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional

1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor

Tujuan : Pengadaan peralatan kantor dilaksanakan untuk peningkatan kenyamanan kerja aparatur

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.15.000.000,-	Rp.14.200.000,-
Output/ Keluaran	Jenis perlengkapan kantor terbeli	1 unit computer 1 unit printer	1 unit computer 1 unit printer
Hasil	Aparatur bekerja dengan baik dan maksimal	100%	94.67%

Permasalahan : -

III. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Tujuan : Terpeliharanya stabilitas serta keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam proses pembangunan

Sasaran : Meningkatnya kewaspadaan dini terhadap potensi terjadinya konflik

1. Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah

Tujuan : Terlaksananya Operasionalisasi Kominda dalam mendeteksi dini potensi gangguan konflik di tengah-tengah masyarakat

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 384.500.000,-	Rp. 344.550.800,-
Output/ Keluaran	Laporan operasional Kominda	12 laporan	12 laporan
Hasil	Tersedianya bahan dalam penyusunan kebijakan Kepala daerah	100%	98.87%

Permasalahan :

2. Kegiatan Pemantauan Kegiatan Orang Asing

Tujuan : Terlaksananya pemantauan kegiatan Orang Asing , Lembaga Asin dan Non Goverment Organization di Kota Bukittinggi dalam rangka terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 7.812.000,-	Rp. 0,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil pemantauan	3 kasus	Laporan bulanan
Hasil	Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	100%	0 %

Permasalahan : Pencairan dana dari kegiatan ini dilaksanakan apabila terjadi kasus tentang pengawasan orang asing dan kegiatan ini secara fisik dilakukan yaitu dengan adanya laporan pengawasan bulanan.

3. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Sosial

Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dalam Negeri / Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan untuk menjaga stabilitas dari gangguan keamanan dari dalam Negri .

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 9.100.500,-	Rp. 0,-
Output/ Keluaran	Terlaksananya laporan Konflik Sosiali	1 berkas	1 berkas
Hasil	Adanya rencana aksi penanganan Konflik Sosial	100%	0 %

Permasalahan : Pelaksanaan kegiatan secara fisik tetap berjalan numun secara keuangan tidak dicairkan dalam rangka efesiensi anggaran.

4. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi / Izin Penelitian dan Keramaian.

Tujuan : Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam hal terbitnya rekomendasi tersebut di Kota Bukittinggi

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.9.936.500,-	Rp.5.266.200,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil	24 laporan	24 laporan
Hasil	Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	100%	53%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini karena penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan efesiensi.

5. Kegiatan Operasional SATGAS SABER Pungli

Tujuan : Terlaksananya Operasional SATGAS SABER Pungli dalam mendeteksi dini potensi gangguan konflik di tengah-tengah masyarakat

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja	Realisasi
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.93.804.000,-	Rp.43.266.500,-
Output/ Keluaran	Laporan kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
Hasil	Terlaksananya kegiatan Satgas Saber Punli.	100%	46.12%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

IV. Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

1. Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi Wawasan Kebangsaan

Tujuan : Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan koordinasi Pemantapan Idiologi Wawasan Kebangsaan di Kota Bukittinggi.

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.16.135.000,-	Rp.16.135.000,-
Output/ Keluaran	Laporan peserta sosialisasi	150 orang	124 orang
Hasil	Meningkatnya Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	82%	100 %

Permasalahan :

2. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara

Tujuan : Terlasananya Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara guna meningkatnya pemahaman akan kesadaran dalam membela Negara

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.28.503.800,-	Rp.19.413.000,-
Output/ Keluaran	Peserta penyuluhan peningkatan Bela Negara	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Peningkatan kesadaran tentang Bela Negara	100%	68.11%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

V. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Tujuan : Meningkatnya tatanan kehidupan demokrasi di Kota Bukittinggi
- Sasaran : Meningkatnya pendidikan dan kesadaran politik di tengah – tengah masyarakat di Kota Bukittinggi

1. Kegiatan Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi

- Tujuan : Terlaksannya Forum diskusi politik dilaksanakan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.2.411.999.675,-	Rp.2.335.824.151,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil Forum Diskusi Politik	24 laporan	24 laporan
Hasil	Tersedianya bahan penyusunan kebijakan Kepala daerah	100%	96.45%

Permasalahan : -

2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- Tujuan : Terlaksananya Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Parpol dilaksanakan guna memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka pencairan bantuan keuangan kepada Partai Politik

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.3.190.000,-	Rp.2.155.900,-
Output/ Keluaran	Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Parpol	10 Parpol	10 Parpol
Hasil	Lengkapnya syarat pencairan bantuan keuangan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	67.58%

Permasalahan : Rendahnya realisasi dari target yang ditetapkan pada kegiatan ini karena proses verifikasi dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi dari BPK terkait pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik pada tahun sebelumnya

3. Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Tujuan : Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan pelaksanaan pembinaan Ormas yang terdaftar di Kota Bukittinggi berkaitan dengan hak dan kewajibannya serta memfasilitasi pendaftaran ormas

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.20.243.500,-	Rp.18.341.200,-
Output/ Keluaran	Laporan pembinaan Ormas dan SKTO Ormas/LSM	12 Ormas	12 Ormas
Hasil	Terlaksananya pembinaan ormas dan pendaftaran ormas	100%	90.60%

Permasalahan

4. Kegiatan Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuanan Partai Politik

Tujuan : Terlaksananya Bimtek Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kota Bukittinggi .

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 27.885.000,-	Rp.22.589.550,-
Output/ Keluaran	Peserta Bimtek	40 Orang	25 Orang
Hasil	Terselenggaranya Bimtek Pertanggungjawaban Bantuan Keuanan kepada Partai Politik	63%	81.01%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan tidak maksimalnya kehadiran peserta Bimtek dan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik

Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi Undang-Undang Bidang Politik bertujuan guna peningkatan pendidikan dan kesadaran politik masyarakat

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.12.190.000 ,-	Rp. 10.329.600,-

Output/ Keluaran	Peserta Sosiaslisasi	50 orang	40 orang
Hasil	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang undang-undang politik dsb	100%	84.74%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Kegiatan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Verifikasi dan Pemutakhiran data Organisasi Kemasyarakatan yang bertujuan untuk dapat tertatanya Ormas yang ada di Kota Bukittinggi.

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 6.178.800,-	Rp. 3.877.400,-
Output/ Keluaran	Laporan Verifikasi dan Pemutakhiran data Ormas/LSM	40 Eks	40 Eks
Hasil	Terlaksananya Verifikasi dan Pemutakhiran data Ormas dan LSM	100%	62.75%

Permasalahan: Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

7. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat

Tujuan : Terlaksananya Peningkatan kesadaran politik dan organisasi masyarakat dilaksanakan guna meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.14.366.700,-	Rp.14.366.700,-
Output/ Keluaran	Peserta peningkatan kesadaran berpolitik	100 orang	92 orang
Hasil	Meningkatnya pemahaman peserta tentang kesadaran berpolitik	92 %	100 %

Permasalahan : .

VI. Program Pelaksanaan Penghormatan Hari – Hari Besar

1. Kegiatan Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar lainnya .

Tujuan : Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya di Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.12.490.000,-	Rp.4.262.500,-
Output/ Keluaran	Pelaksanaan Upacara	4 kegiatan	4 kegiatan
Hasil	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	100%	34.13%

Permasalahan : Rendahnya pencairan Dana dalam kegiatan ini dikarenakan pencairan disesuaikan dengan kebutuhan.

VII. Program Pendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada

1. Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu / Pilkada

Tujuan : Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada bertujuan guna peningkatan pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pemilu/pilkada.

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.94.492.300,-	Rp.32.957.300,-
Output/ Keluaran	Pelaksanaan Upacara	1 laporan	1 laporan
Hasil	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	100%	34.88%

Permasalahan : Rendahnya pencairan Dana dalam kegiatan ini dikarenakan pencairan disesuaikan dengan kebutuhan

2. Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu / Pilkada

Tujuan : Terlaksananya Koordinasi dan Pemantauan yang bertujuan Pemilu dan Pilpres berjalan aman, damai dan lancar di Kota Bukittinggi.

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.308.361.000,-	Rp.262,928,650,-
Output/ Keluaran	Pelaksanaan Upacara	8 laporan	8 laporan
Hasil	Terlaksananya Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	100%	85.27%

Permasalahan : Rendahnya pencairan Dana dalam kegiatan ini dikarenakan pencairan disesuaikan dengan kebutuhan.

VIII. Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Kerukunan Beragama.

Tujuan : Terpeliharanya Kerukunan antar umat beragama di Kota Bukittinggi.

Sasaran : Mencegah terjadinya konflik intern / antar umat beragama di tengah – tengah masyarakat

I. Kegiatan Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dalam mendeteksi dini potensi gangguan konflik di tengah-tengah masyarakat

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 178.205.500,-	Rp.124.087.025,-
Output/ Keluaran	Laporan sosialisasi dan Razia	210 orang	202 orang
Hasil	Terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan Razia.	100%	69.63%

Permasalahan : Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan ini dikarenakan pencairan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan.

2. Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi

Tujuan : Terlaksananya Pembinaan kerukunan umat beragama yang berguna meningkatkan toleransi antar umat beragama dan bebas konflik intern / antar umat beragama di Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp.3.780.000,-	Rp.2.001.600,-
Output/ Keluaran	Laporan hasil pemantauan	1 laporan	1 laporan

Hasil	Meningkatnya Keamanan ,ketertiban dan Stabilitas daerah	100%	52.95%
-------	---	------	--------

Permasalahan : -

IX. Program Pencegahan penanganan dan rehabilitasi narkoba.

- Tujuan : Terciptanya Kota Bukittinggi bersih dari penyakit masyarakat
- Sasaran : Terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat

1. Kegiatan Pembekalan Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba.

- Tujuan : Terlaksananya Pembekalan Penangulangan dan Peredaran Gelap narkoba Penyuluhan bertujuan untuk mencegah peredaran dan penggunaan miras dan narkoba di Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 18.764.500,-	Rp. 18.764.600,-
Output/ Keluaran	Peserta Pembekalan Penanggu langan Penyalah gunaan Narkoba	120 orang	120 orang
Hasil	Meningkatnya pemahaman tentang bahaya miras dan narkoba	100%	100%

Permasalahan :

2. Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkoba (Kompani) Kota Bukittinggi.

- Tujuan : Terlaksananya Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkoba bertujuan untuk mencegah peredaran dan penggunaan narkoba di Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 43.138.000,-	Rp. 40.089.500,-
Output/ Keluaran	Terlaksananya operasionalisasi Kompani	1 lapora	1 Lapora
Hasil	Meningkatnya Peranan	100%	92,93%

	Pemuda untuk pencegahan peredaran Narkoba		
--	---	--	--

Permasalahan :

3. Kegiatan Test Urine bagi ASN di Lingkungan Kota Bukittinggi.

Tujuan : Terlaksananya Test Urine bagi ASN di Lingkungan Pemda Kota Bukittinggi

<i>Indikator</i>	<i>Tolok Ukur Kinerja</i>	<i>Target Kinerja</i>	<i>Realisasi</i>
Input/ Masukan	Jumlah Dana	Rp. 55.322.000,-	Rp. 49.246.000
Output/ Keluaran	Laporan Pemeriksaan Test Urine ASN Pemda Kota Bukittinggi	600 Oang	600 Orang
Hasil	Terlaksananya kegiatan Test Urine bagi ASN Pemda Kota Bukittinggi	100%	89.02%

Permasalahan :

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH SKPD (*Tidak Ada*)

BAB III
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA** (*Tidak Ada*)
- B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN** (*Tidak Ada*)

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH (*Tidak Ada*)

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (*Tidak Ada*)

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal dalam beberapa kegiatan sebagai berikut

1). Forum Pemantapan Kerukunan Umat Beragama

Kegiatan Pemantapan Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan guna meningkatkan toleransi antar umat beragama di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi.

2). Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah

Kegiatan Operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah yang bertujuan guna mendeteksi potensi gangguan keamanan di Kota Bukittinggi, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kantor Imigrasi Kota Bukittinggi serta Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi

3). Forum Diskusi Politik

Kegiatan Koordinasi Forum Diskusi Politik yang bertujuan guna memberikan masukan kepada Kepala daerah dalam menyusun kebijakan di Kota Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Bukittinggi, Kodim 0304 Agam, Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, Pengadilan Negeri Kota Bukittinggi serta Pengadilan Agama Kota Bukittinggi.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh kegiatan dilaksanakan yang berkoordinasi dengan instansi vertikal dapat terealisasi dengan baik.

3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan yang berkoordinasi dengan instansi vertikal tidak ditemui permasalahan yang dihadapi.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH (*Tidak Ada*)

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA (*Tidak Ada*)

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS (*Tidak Ada*)

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
(*Tidak Ada*)

BAB V

PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berisikan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2018, maka Walikota Bukittinggi berkewajiban menyampaikan LKPJ penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2018. LKPJ disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Dalam rangka mendukung penyusunan LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018, dibutuhkan bahan dan dokumen pendukung dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebagai pelaksana program dan kegiatan Pemerintah Kota Bukittinggi. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi sebagai salah satu perangkat daerah Kota Bukittinggi juga melaksanakan penyusunan LKPJ berbasis Program dan Kegiatan SKPD.

Semoga dengan LKPJ Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 ini dapat melengkapi penyusunan LKPJ Walikota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Bukittinggi, Januari 2019

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. ALDIASNUR,MSi
NIP. 197208161993031006